

Destinasi Berkembang Menuju Klaster Maju: Kecenderungan Kunjungan Wisatawan di Klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda



Iwan Setiawan Basri^{a,1}, Hadi Abdurrahman^{b,2}, Rosmiaty Arifin^{c,3}, Sri Mulyati^{d,4},
 H. Salenda^{c,5}

^{a,b,d} Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako Palu, Indonesia

^{c,e} Prodi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako Palu, Indonesia

¹ iwan.setiawan@untad.ac.id; ² hadiabdurrahman@untad.ac.id; ³ rosmiaty_f221@untad.ac.id;

⁴ physicmulya@gmail.com; ⁵ adhyarsitektur@gmail.com

Submitted: February 09, 2026 | Revised: May 09, 2023 | Accepted: March 03, 2026

ABSTRACT

Village and community-based tourism has increasingly been promoted as a strategy to ensure a more equitable distribution of development benefits, particularly in archipelagic regions such as Banggai Kepulauan Regency, Indonesia. This study examines tourist visitation trends in the Danau Paisu Pok–Pantai Poganda Cluster during the 2022–2024 period, determines its position within the regency’s priority destination system using the Tourism Area Life Cycle (TALC) framework, and analyzes management implications from a community-based tourism (CBT) perspective, including the strengthening of regional tourism data systems, through a descriptive exploratory approach based on secondary data. The findings reveal a rapid increase in tourist arrivals, from 20,555 visitors in 2022 to 49,696 in 2023, reaching 51,669 visits by September 2024. This growth places the cluster in the growth phase of the TALC model and indicates a functional transition from an emerging destination toward an advanced tourism cluster, characterized by a visitation surge exceeding 140%, consistent official promotion, strengthened policy support, and a contribution of approximately 47.39% to total tourist arrivals in Banggai Kepulauan Regency in 2024. Institutional strengthening at the village level particularly the designation of Luk Panenteng Village as a developing tourism destination along with community empowerment through CBT, emerges as a key factor supporting the sustainable management of the tourism cluster.

Keywords: Tourism Cluster, Community-Based Tourism, Tourism Area Life Cycle, Village-Based Tourism, Banggai Kepulauan.

This is an Open-Access article distributed under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Pariwisata memegang peran strategis dalam perekonomian nasional dan daerah, khususnya pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19 seiring meningkatnya kembali mobilitas wisatawan nusantara. Data perjalanan wisata domestik nasional menunjukkan *fase rebound* yang kuat setelah penurunan signifikan pada tahun 2020, dari 722,16 juta perjalanan pada 2019 menjadi 524,57 juta, kemudian meningkat kembali menjadi 734,86 juta pada 2022 dan mencapai 825,80 juta perjalanan pada 2023 [1]. Pemulihan ini membuka peluang pengembangan destinasi berbasis lokal, termasuk desa wisata.

Berdasarkan konteks tersebut, pengembangan desa wisata sebagai bentuk pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism* / CBT) diposisikan sebagai instrumen untuk mempromosikan budaya lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta berkontribusi pada pengurangan ketimpangan wilayah [2]. Namun, berbagai studi juga menunjukkan bahwa implementasi CBT di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan

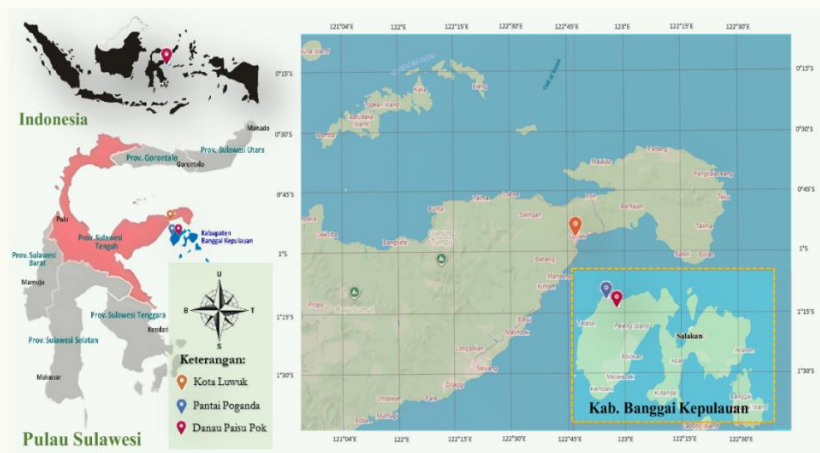
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas dan jejaring kelembagaan yang belum memadai. Studi di kawasan desa wisata Borobudur, misalnya, mengidentifikasi bahwa keterbatasan sarana transportasi dan akomodasi, kapasitas SDM, serta kelembagaan lokal menjadi faktor penghambat utama pengembangan desa wisata [3].

Keberhasilan CBT sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal, keterhubungan antara masyarakat dan pemerintah desa, serta kualitas tata kelola kolaboratif. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa desain tata kelola yang inklusif dan relatif setara antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta berkontribusi terhadap distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil [4],[5],[6]. Oleh karena itu, kapasitas tata kelola lokal menjadi faktor kunci dalam memastikan desa wisata berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan nasional melalui Program Jejaring Desa Wisata dan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 mendorong desa wisata berkembang menuju destinasi yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, dan promosi terpadu [7],[8]. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa menunjukkan variasi yang tinggi dan masih terbatas kajian berbasis kasus lokal.

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai wilayah kepulauan dengan lanskap karst, pesisir, dan perbukitan memiliki potensi pariwisata yang berkembang pada klaster tertentu, salah satunya Desa Luk Panenteng yang ditetapkan sebagai desa wisata melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 268 Tahun 2024 [9]. Pada tingkat nasional, Desa Luk Panenteng dikategorikan sebagai desa wisata berkembang, ditandai oleh pengelolaan atraksi yang mulai berjalan, ketersediaan amenities dasar, aksesibilitas yang relatif baik, serta kelembagaan lokal yang aktif [7] [10], seperti Pokdarwis dan/atau BUMDes telah aktif, sehingga desa ini mulai dikenal pada skala regional bahkan mulai di kenal wisatawan mancanegara[11].

Danau Paisu Pok–Pantai Poganda ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan daerah sejak 2019 dan meningkat menjadi daya tarik unggulan kabupaten pada 2024 melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 165 Tahun 2019 dan Nomor 605 Tahun 2024. [12], [13]. Ketiga daya tarik wisata ini mencakup Danau Paisu Pok, Permandian Paisu Batango, dan Pantai Poganda. Namun yang sering dipromosikan satu kesatuan destinasi adalah klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda. Secara spasial, Permandian Paisu Batango berjarak sekitar ± 800 meter, sementara Pantai Poganda terletak sekitar $\pm 9,2$ kilometer arah barat dari Danau Paisu Pok. Dalam perspektif arsitektur–wilayah, klaster destinasi dapat dibaca melalui struktur ruang berupa *path/corridor* dan *node* yang membentuk keterhubungan antar titik aktivitas [14]. Pola kunjungan kemudian termanifestasi sebagai lintasan (*trajectories/routes*) dan arus kunjungan (*flows*) yang perlu dipahami untuk intervensi desain dan pengelolaan destinasi [15]. Posisi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam konteks wilayah dan lebih luas ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Posisi Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber: Google Earth (2025); diolah.

Perkembangan klaster tersebut ditandai oleh peningkatan fasilitas secara bertahap [16], [17], [18], meskipun sebagian kajian terdahulu masih menelaah objek wisata secara terpisah. Siti Fadila Bete dkk. (2024), misalnya, mengkaji Danau Paisu Pok dengan fokus pada pola kunjungan wisatawan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) [19].

Data Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (2024) menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan, dengan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari tahun 2022 ke 2023 (141,78%), serta tambahan kenaikan sekitar 3,97 % pada periode Januari–September 2024 [20]. Pada skala desa, peningkatan kunjungan turut memperluas kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sementara penguatan tata kelola BUMDes masih menjadi kebutuhan penting [19]. Kerangka kebijakan daerah melalui *Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023–2026* [21], yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2020–2025*, mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Desa Luk Panenteng dan wilayah sekitarnya ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) I [22].

Meskipun Desa Luk Panenteng telah ditetapkan sebagai desa wisata dan destinasi unggulan serta terintegrasi dalam jejaring promosi nasional dan dikenal sebagai salah satu destinasi populer di Kabupaten Banggai Kepulauan [7]–[18], kajian yang secara komprehensif menempatkan Klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda dalam struktur tersebut masih terbatas. Secara khusus, penelitian mengenai dinamika transisi klaster berkembang menuju klaster maju beserta implikasinya terhadap kapasitas pengunjung dan tata kelola CBT juga masih relatif sedikit.

Sejauh ini, kajian pariwisata berbasis komunitas maupun pembacaan fase destinasi melalui TALC umumnya dilakukan pada skala daya tarik tunggal atau berfokus pada aspek naratif/kelembagaan tanpa dukungan indikator permintaan yang konsisten dalam deret waktu. Di sisi lain, pemaknaan “klaster” kerap berhenti pada kedekatan spasial, belum ditautkan secara eksplisit dengan perannya dalam sistem destinasi kabupaten serta konsekuensi pengelolaannya. Studi ini mengisi celah tersebut dengan membaca kecenderungan kunjungan klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda pascapandemi menggunakan data kunjungan resmi 2022–2024 (Januari–September) dan mengaitkannya dengan konteks historis Danau Paisu Pok, dinamika penerimaan desa, serta penguatan status kebijakan dan promosi resmi. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan argumen berbasis data untuk memposisikan klaster sebagai simpul strategis destinasi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tata kelola (*capacity management*, zonasi, dan integrasi arus wisata) pada fase transisi pertumbuhan menuju konsolidasi awal.

METODE

Desain Penelitian

Rancangan penelitian bersifat deskriptif eksploratif berbasis data sekunder untuk menjawab tiga tujuan utama, meliputi analisis kecenderungan kunjungan, penilaian posisi klaster dalam sistem destinasi berkembang, dan interpretasi implikasi tata kelola berbasis komunitas. Kerangka analitik memadukan perspektif CBT untuk menilai peran dan kapasitas komunitas [6],[23],[24], serta konsep TALC untuk membaca tahap perkembangan destinasi berdasarkan dinamika kunjungan [25].

Sumber dan Pembacaan Data

Data utama penelitian berupa angka kunjungan wisatawan Klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda tahun 2022, 2023, serta periode Januari–September 2024 [20], yang digunakan untuk menganalisis laju pertumbuhan dan menentukan posisi relatif klaster dalam sistem pariwisata kabupaten. Data pendukung berupa total kunjungan wisatawan nusantara tahun 2023 [1] digunakan sebagai pembandingan untuk menilai posisi klaster pada struktur pariwisata daerah dan nasional berdasarkan pangsa kunjungan, tren pertumbuhan, dan keterkaitannya dengan kebijakan pengembangan destinasi.

Analisis kelembagaan dan arah pengembangan diperkuat melalui basis data desa wisata

kemenpar Jadesta (2024) [7] dan dokumen kebijakan daerah, termasuk SK penetapan desa wisata dan daya tarik unggulan (No. 268/2024; No. 165/2019; No. 605/2024) [9], [12], [13].

Data kunjungan Danau Paisu Pok dan kontribusi terhadap PAD Desa Luk Panenteng periode 2018–2023 [14] dimanfaatkan untuk menilai dinamika pengelolaan berbasis komunitas, dengan data resmi Dinas Pariwisata sebagai acuan utama. Meskipun kajian sebelumnya menempatkan Danau Paisu Pok sebagai unit analisis tersendiri, penelitian ini menggunakan data Dinas Pariwisata 2022–2024 untuk analisis tingkat klaster dan data Bete dkk. (2024) [19] untuk menilai kontribusi Danau Paisu Pok terhadap PAD desa.

Teknik Pengolahan dan Analisis

1. Analisis kecenderungan kunjungan

Data kunjungan klaster disusun per tahun, kemudian dihitung perubahan absolut dan tingkat pertumbuhan sederhana antar periode. Tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan (\%)} = \frac{\text{Kunjungan tahun } n - \text{Kunjungan tahun sebelumnya}}{\text{Kunjungan tahun sebelumnya}} \times 100\% \quad (1)$$

Perhitungan dilakukan untuk periode 2022–2023, sedangkan angka 2024 dibaca secara hati-hati karena hanya mencakup Januari–September.

2. Kontribusi klaster

Pangsa kunjungan dihitung dengan membandingkan jumlah kunjungan ke klaster dengan total kunjungan wisatawan nusantara kabupaten pada tahun yang Data ini digunakan untuk menilai bobot relatif klaster dalam struktur destinasi kabupaten, dengan kesadaran bahwa deret data destinasi lain tidak tersedia secara seragam.

3. Analisis posisi klaster

Interpretasi dilakukan menggunakan indikator operasional, yaitu pangsa kunjungan berdasarkan menurut Pedoman Desa Wisata (2021) [10], dengan kriteria klaster maju ditetapkan dengan kriteria berikut:

- a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata desa, termasuk dalam hal pengembangannya;
- b. Desa telah menjadi destinasi wisata yang dikenal luas dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara; serta,

status daya tarik unggulan dalam kebijakan daerah, dan konsistensi penampilan dalam materi promosi resmi Pendekatan ini membantu menilai pergeseran klaster dari destinasi berkembang menuju klaster maju.

4. Analisis CBT dan TALC

Temuan kuantitatif dihubungkan dengan kerangka CBT yang mencakup partisipasi masyarakat, distribusi manfaat, dan kapasitas kelembagaan, serta dengan kerangka siklus hidup destinasi (pada fase pertumbuhan dan awal konsolidasi).

5. Analisis PAD Desa

Data kunjungan Danau Paisu Pok dan Pendapatan Asli Desa (PAD) periode 2018–2023 [19] diolah untuk menilai keterkaitan pariwisata dengan ekonomi lokal. Data ini tidak digabung secara numerik dengan data klaster, melainkan digunakan sebagai lapisan analisis pada skala desa untuk membaca hubungan antara kunjungan, PAD Desa, dan kapasitas kelembagaan.

Interpretasi hasil mengacu pada tiga aspek utama:

- a. Kebijakan dan struktur destinasi, melalui pembacaan posisi klaster dalam kerangka destinasi dan status daya tarik unggulan kabupaten
- b. Siklus perkembangan destinasi, dengan menafsir pola pertumbuhan kunjungan sebagai indikasi fase pertumbuhan dan awal konsolidasi dalam siklus hidup kawasan pariwisata (TALC)
- c. Tata kelola berbasis komunitas, dengan menghubungkan kecenderungan kunjungan dan kontribusi ekonomi di Danau Paisu Pok dengan kapasitas kelembagaan desa wisata serta

pilar CBT seperti partisipasi, distribusi manfaat, dan kekuatan kelembagaan lokal.

6. Definisi operasional;

(1) kunjungan wisatawan (kecenderungan jumlah dan laju pertumbuhan antarperiode); (2) pangsa kunjungan (proporsi kunjungan kluster terhadap total kunjungan kabupaten); (3) PAD desa (nilai PAD dari pengelolaan daya tarik inti sebagai proksi manfaat ekonomi); (4) infrastruktur dasar (ketersediaan akses, parkir, sanitasi, dan pengelolaan sampah berdasarkan dokumen sekunder); (5) kelembagaan (peran pokdarwis/bumdes serta arah kebijakan/promosi resmi); (6) diversifikasi produk/layanan (variasi atraksi dan layanan berbayar sebagai indikasi awal).

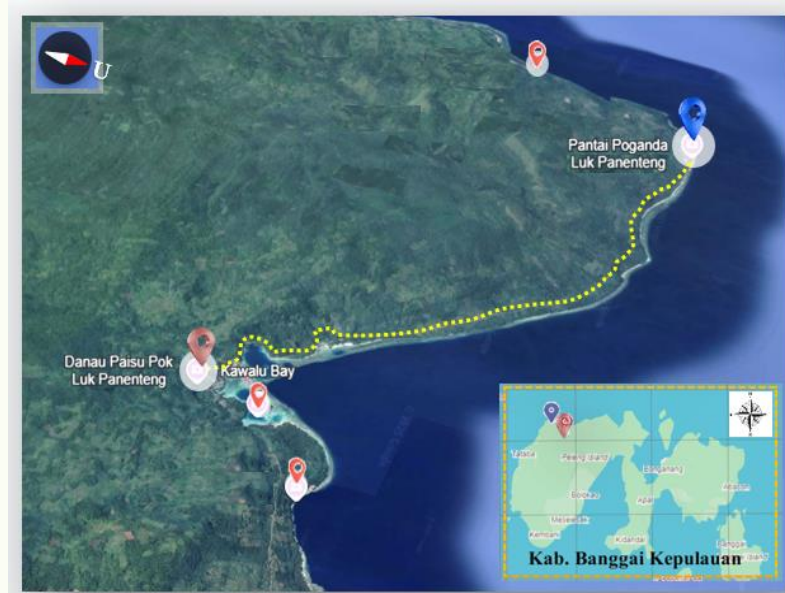
Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait rentang data pendek (2022–2024) yang bersifat agregat tahunan, ketiadaan data rinci bulanan, asal wisatawan, dan lama tinggal, sehingga membatasi analisis temporal, karakteristik kunjungan, serta penerapan kerangka *tourism area life cycle* (TALC). Ketergantungan pada data sekunder temuan bersifat deskriptif eksploratif. Seluruh hasil dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan ini, dan temuan disintesis menjadi strategi adaptif untuk pengelolaan kluster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda, penguatan kapasitas BUMDes/Pokdarwis, serta kebijakan tata kelola CBT yang berkelanjutan di Desa Luk Panenteng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Objek penelitian berada di Pulau Peleng, Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, yang mencakup Danau Paisu Pok pada koordinat 1°13'02" LS; 122°58'21" BT dan Pantai Poganda pada 1°10'48" LS; 122°54'47" BT. Kedua lokasi terhubung dalam rentang ±9,2 kilometer dengan waktu tempuh ±15–20 menit, atau sekitar 3,5 jam dari ibu kota kabupaten di Salakan.



Gambar 2. Posisi Kluster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda di Desa Luk Panenteng
Sumber: Google Earth, 2025; diolah.

Karakter dan Posisi Kluster Danau Paisu Pok – Pantai Poganda

Kluster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda menempati posisi strategis dalam struktur destinasi Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Danau Paisu Pok yang menampilkan lanskap danau karst yang menampilkan lanskap danau karst berair jernih, hutan alami, tebing batu kapur, serta habitat gagak Peling dan tarsius endemik [26], [27]. Gambar 3 memperlihatkan representasi visual kedua daya tarik yang berfungsi sebagai inti kluster.



Gambar 3. (a1-2) Lanskap Danau Paisu Pok, (b1-2) Lanskap Pantai Poganda
Sumber: Dokumen sekunder, 2024–2025; diolah.

Kombinasi keunggulan daya tarik alam tersebut memperkuat diferensiasi klaster dalam lanskap pariwisata wilayah kepulauan. Kedekatan spasial Klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda ($\pm 9,2$ km) mendorong pola kunjungan yang umumnya dikemas sebagai satu rangkaian perjalanan harian. Kondisi ini menjadikan klaster sebagai simpul penting dalam pengembangan pariwisata kabupaten, sekaligus menguatkan indikasi pergeseran desa wisata unggulan dari klaster berkembang menuju destinasi klaster maju.

Kecenderungan Kunjungan Wisatawan 2022–2024

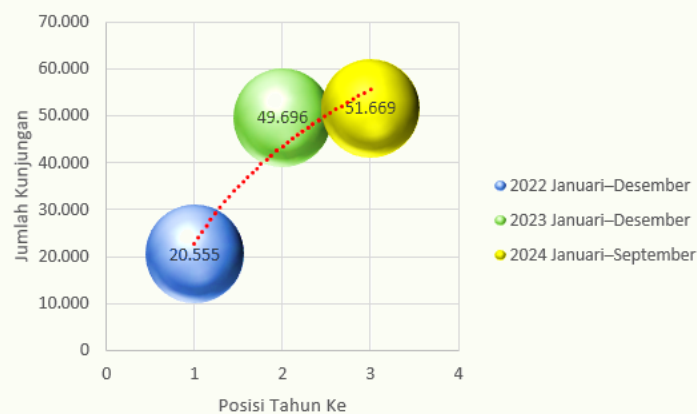
Data kunjungan wisatawan ke klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda tersaji pada Tabel 1. Angka pada 2022 dan 2023 [20] mencakup satu tahun penuh, sedangkan data 2024 bersifat parsial karena hanya meliputi periode Januari–September (lihat Tabel 1). Dengan demikian, apabila angka 2024 tampak lebih rendah dibanding 2023, hal tersebut disebabkan cakupan bulan yang belum lengkap (januari–september), bukan indikasi penurunan.

Tabel 1. Kunjungan wisatawan ke klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda, 2022–2024

Tahun	Kunjungan (orang)	Perubahan Absolut	Pertumbuhan
2022	20.555	—	—
2023	49.696	+29.141 (%)	141,78 (%)
2024	51.669	+1.973(%)	3,97 (%)

* Data 2024 mencakup Januari–September, sehingga tidak sepenuhnya sebanding dengan 2023.

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (2024), diolah. [20]



Gambar 4. Kecenderungan Kunjungan Wisatawan Ke Klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda, 2022–2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (2024) [20]; diolah.

Gambar 4 menunjukkan kecenderungan kunjungan, dengan lonjakan dari 20.555 wisatawan pada 2022 menjadi 49.696 pada 2023, hingga September 2024 jumlah kunjungan telah mencapai 51.669 wisatawan [20] menunjukkan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan pascapandemi.

Pola ini mengindikasikan potensi transisi destinasi dari klaster berkembang menuju klaster maju, meskipun aspek tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan masih perlu penguatan. Dalam perspektif TALC [25], periode 2022–2024 mencerminkan fase pertumbuhan intensif yang mulai memasuki tahap konsolidasi awal 2024, ditandai oleh eksposur pasar yang meningkat, promosi lebih terarah, dan kebutuhan pengelolaan kapasitas lebih sistematis.. Interpretasi ini masih bersifat indikatif karena data 2024 belum sepenuhnya lengkap.

Kontribusi Klaster Dalam Sistem Destinasi Kabupaten

Kontribusi klaster terhadap sistem destinasi Kabupaten Banggai Kepulauan diukur melalui pangsa kunjungan dibandingkan total perjalanan wisatawan nusantara. Pada tahun 2023, total kunjungan tercatat sekitar 825,80 ribu perjalanan [1], dengan 49.696 kunjungan ke klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda, mengalami pertumbuhan 141,78% dibanding tahun 2022 [20] (lihat Tabel 1), jauh melampaui laju pertumbuhan wisatawan nusantara secara nasional sebesar 12,37% [1], sehingga pangsa klaster mencapai 47,39% dari total kunjungan kabupaten (104.837 kunjungan) [25].

Sesuai Pedoman Desa Wisata (2021) [10], nilai ini menunjukkan bahwa klaster telah memenuhi kriteria desa (klaster) wisata maju, di mana destinasi ini dikenal luas oleh wisatawan dan menandai transisi dari tahap desa wisata berkembang menuju tahap maju, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi wisata dan pengembangan desa sebagai destinasi unggulan. Kombinasi pangsa kunjungan yang besar, pengakuan formal, dan intensitas promosi menegaskan peran klaster sebagai simpul utama pergerakan wisatawan di kabupaten.

Keterbatasan data deret waktu untuk destinasi berkembang lain membatasi perbandingan kuantitatif antar-klaster. Oleh karena itu, penilaian posisi klaster sebagai “maju” diposisikan secara relatif, berdasarkan indikator pangsa kunjungan, status kebijakan, dan konsistensi promosi, namun tetap mencerminkan kontribusi signifikan klaster terhadap sistem destinasi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diuraikan.

Implikasinya terhadap kapasitas dan penataan ruang klaster

Lonjakan kunjungan wisatawan Klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda pada periode 2022–2025 sebesar 141,78% (lihat Tabel 1) [20] memberikan tekanan signifikan terhadap daya dukung ekologis dan kapasitas infrastruktur dasar. Peningkatan aktivitas wisata berpotensi menurunkan kapasitas jasa ekosistem pesisir melalui perubahan habitat, tekanan pada vegetasi pantai, dan degradasi kualitas lingkungan laut [28]. Sementara keterbatasan fasilitas pendukung seperti parkir, sanitasi, dan pengelolaan sampah berisiko menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Kondisi ini menuntut pengendalian pengembangan melalui pengaturan daya dukung dan penataan zonasi kawasan.

Dalam kerangka TALC, klaster ini berada pada fase pengembangan menuju konsolidasi, sehingga penerapan daya dukung lingkungan pariwisata dan zonasi berbasis konservasi, meliputi zona inti konservasi, zona pemanfaatan, dan zona penunjang menjadi instrumen kunci untuk menetapkan batas kunjungan harian, mengarahkan pemanfaatan ruang, serta menjaga keberlanjutan ekosistem dan peluang rejuvenasi destinasi [25],[29], [30].

Lonjakan kunjungan dalam waktu singkat periode 2022-2024 (141,78%) [20] memberi tekanan langsung pada daya dukung ekologis dan infrastruktur dasar di klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda. Kajian pengelolaan wilayah pesisir, keberlanjutan, dan *trade-off* antara manfaat ekonomi pariwisata dan degradasi lingkungan bahwa pengembangan wisata pesisir dapat mengurangi kapasitas jasa ekosistem melalui perubahan habitat, tekanan terhadap vegetasi pantai, dan degradasi kualitas lingkungan laut [28].

Keterbatasan fasilitas pendukung di klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda, seperti area parkir, sanitasi, dan sistem pengelolaan sampah, berpotensi menurunkan kualitas pengalaman

wisatawan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dasar. Infrastruktur yang tersedia saat ini meliputi dermaga, jalan setapak, perahu wisata, gazebo, ruang jaga, serta mushola non permanen [31]. Peningkatan intensitas kunjungan tersebut menuntut penerapan pengelolaan daya dukung yang lebih disiplin, mengingat tingginya sensitivitas ekologis dan keterbatasan infrastruktur klaster. Salah satu instrumen strategis yang dapat diterapkan adalah penataan zonasi kawasan wisata.

Penataan kawasan pesisir dan bahari harus berlandaskan prinsip konservasi untuk menjaga keseimbangan alam melalui pembagian zona inti, zona khusus, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Pengembangan ekowisata pesisir dan bahari dilakukan dengan menerapkan zonasi fungsi yang meliputi zona inti konservasi, zona pemanfaatan atau rekreasi, serta zona penunjang, yang ditetapkan berdasarkan perhitungan daya dukung ekologis (*ecological carrying capacity*) guna menentukan batas maksimum kunjungan harian demi keberlanjutan ekosistem dan kenyamanan wisatawan [29][30]. Integrasi zonasi dengan manajemen arus wisata di klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda diperlukan untuk menghindari konsentrasi berlebihan dan menjaga stabilitas kualitas ruang dan lingkungan.



Gambar 5. (a) Gerbang Masuk 2024, (b) Gerbang Masuk 2025, (c) Tempat Parkir 2025, (d) Tempat Sampah 2025, (e) Gazebo
Sumber: Dokumentasi primer dan sekunder, 2024–2025[32]; diolah.

Perspektif CBT, pengaturan kapasitas membutuhkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan penguatan kelembagaan BUMDes. Pendekatan ini memastikan konservasi berjalan seiring dengan pemerataan manfaat ekonomi serta meningkatkan legitimasi keputusan pengelolaan. Berbagai studi CBT menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kapasitas sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal, adaptivitas lembaga, dan transparansi proses pengambilan keputusan [5],[23].

Dimensi Pariwisata Berbasis Community-Based Tourism (CBT) dan Tourism Area Life Cycle (TALC), Kunjungan Danau Paisu Pok, serta Kontribusi PAD Desa

Transformasi klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda dari destinasi berkembang menuju klaster maju terlihat dari peningkatan kunjungan dan menguatnya dinamika ekonomi lokal. Kajian ini menggabungkan kerangka CBT untuk membaca kapasitas komunitas dan peran

kelembagaan, sementara TALC digunakan untuk menilai fase pertumbuhan destinasi dan kebutuhan pengaturan sesuai daya tampung. Penguatan lembaga desa wisata beberapa tahun terakhir turut memperkuat posisi kluster sebagai pusat pertumbuhan baru pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan (lihat Tabel 1).

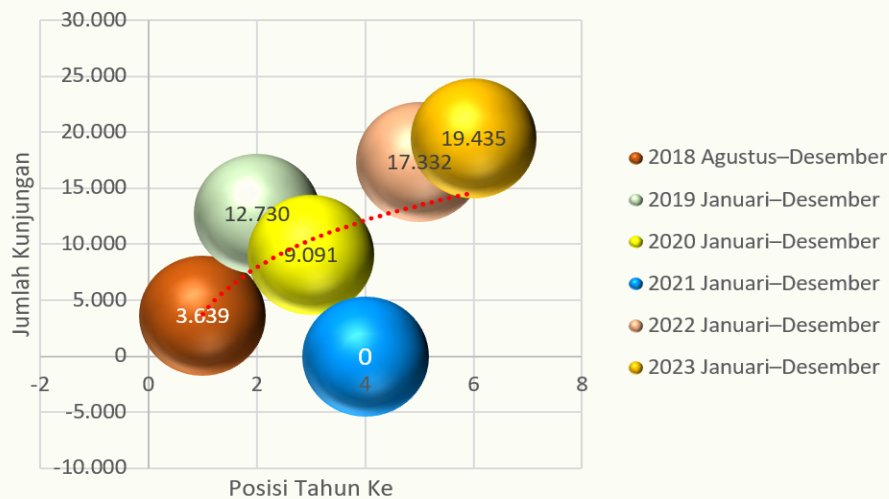
Analisis selanjutnya memfokuskan Danau Paisu Pok sebagai unit tersendiri karena pencatatan kunjungan di tingkat kluster masih bergabung dengan Pantai Poganda. Arus wisatawan di destinasi ini sangat dipengaruhi faktor eksternal, terutama pandemi, pembatasan mobilitas, serta penyesuaian kebijakan operasional destinasi. Sensitivitas tersebut tampak jelas pada periode krisis dan masa transisi menuju pemulihan, sehingga perubahan kunjungan dapat dibaca sebagai respon terhadap dinamika regional dan nasional.

**Tabel 2. Kunjungan Wisatawan ke Danau Paisu Pok
Tahun 2018–2023**

Tahun	Periode	Jumlah kunjungan (orang)	Pertumbuhan (%)
2018	Agustus–Desember	3.639	—
2019	Januari–Desember	12.730	249,82
2020	Januari–Desember	9.091	-28,59
2021	Januari–Desember	—	—
2022	Januari–Desember	17.332	90,65*
2023	Januari–Desember	19.435	12,13

* Pertumbuhan 2022 dibitung berdasarkan tahun terakhir yang memiliki data lengkap (2020), tidak terdapat pencatatan kunjungan pada 2021 akibat pembatasan pandemi Covid-19.

Sumber: Bete dkk. (2024); diolah kembali penulis.



Gambar 6. Kecenderungan Kunjungan Wisatawan Ke Situs Danau Paisu Pok, 2022–2024

Sumber: Bete dkk. (2024), [19]; diolah.

Berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, Gambar 6, dan Gambar 7, periode 2022–2024 menunjukkan fase pertumbuhan berkelanjutan dalam kerangka TALC. Tahun 2022 menjadi titik pemulihan kuat pascapandemi, sedangkan pertumbuhan yang lebih moderat dan stabil pada 2023–2024 mengindikasikan gejala awal konsolidasi, ditandai oleh perlambatan laju pertumbuhan tanpa penurunan jumlah kunjungan. Kondisi ini menegaskan perlunya pengaturan kapasitas kawasan, diversifikasi atraksi, peningkatan kualitas layanan, serta penetapan batas kunjungan harian guna mencegah pergeseran dini menuju fase stagnasi dan menjaga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.

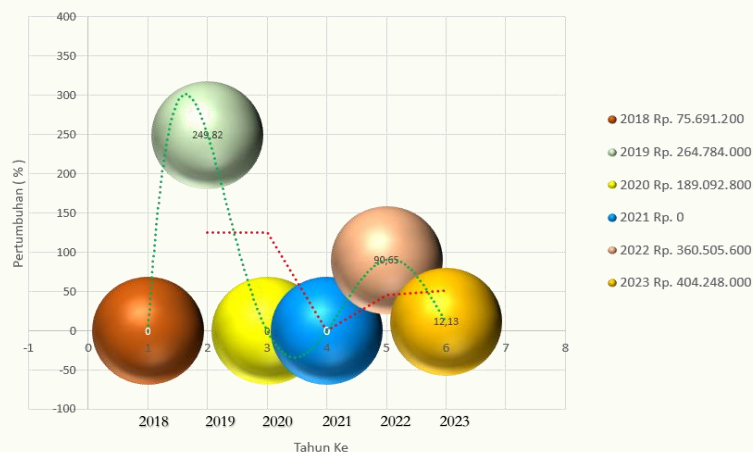
Secara historis, kunjungan wisatawan Danau Paisu Pok meningkat dari 3.639 wisatawan pada 2018 menjadi 12.730 kunjungan pada 2019 (249,82%), terutama didorong oleh promosi digital, kemudian menurun pada 2020 menjadi 9.091 wisatawan akibat pandemi dan terhenti pada 2021. Pemulihan terjadi pada 2022 dengan 17.332 kunjungan (90,65%) dan berlanjut pada 2023 menjadi 19.435 wisatawan (12,13%). Perkembangan kunjungan tersebut sejalan dengan Pendapatan Asli Desa Luk Panenteng, yang meningkat dari Rp75.691.200 pada 2018 menjadi Rp264.784.000 pada 2019, menurun pada 2020, dan pulih pada 2022 menjadi Rp360.505.600 serta meningkat kembali menjadi Rp404.248.000 pada 2023. Pola ini menegaskan peran Danau Paisu Pok sebagai pilar fiskal desa, dengan perubahan kunjungan yang berpengaruh langsung terhadap kinerja PAD [19].

Tabel 3. PAD Desa Luk Panenteng dari Pengelolaan Danau Paisu Pok Tahun 2018–2023

Tahun	PAD Desa dari wisata (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	75.691.200	—
2019	264.784.000	249,82
2020	189.092.800	- 28,59
2021	—	—
2022	360.505.600	90,65*
2023	404.248.000	12,13

Catatan: Pertumbuhan 2022 dihitung berdasarkan tahun terakhir yang memiliki data lengkap (2020). karena tidak terdapat pencatatan kunjungan pada 2021 akibat pembatasan pandemi Covid-19.

Sumber: Bete dkk. (2024) [19] ; diolah kembali penulis.



Gambar 7. PAD Desa Luk Panenteng dari Pengelolaan Danau Paisu Pok Tahun 2018–2023

Sumber: Bete dkk. (2024), [19]; diolah kembali penulis.

Kesamaan pola pertumbuhan pada Tabel 2 dan Tabel 3 merupakan konsekuensi dari struktur pendapatan yang masih berbasis tiket masuk dan retribusi layanan. Dengan tarif yang stabil dan komponen pendapatan lain (parkir, penyewaan gazebo, dan jasa tambahan) bergerak searah dengan volume wisatawan, setiap perubahan kunjungan tercermin hampir linear pada PAD desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa model ekonomi destinasi masih bertumpu pada *direct revenue* sehingga diversifikasi usaha belum memberi kontribusi signifikan. Jika kecenderungan kunjungan 2022–2024 dibaca bersama pola PAD, tampak bahwa pemulihan kluster berlangsung paralel dengan peningkatan kapasitas fiskal desa. Perkembangan ini memperkuat posisi Danau Paisu Pok sebagai sumber pendapatan strategis.

Tabel 4. Daftar Tarif Layanan Wisata 2025

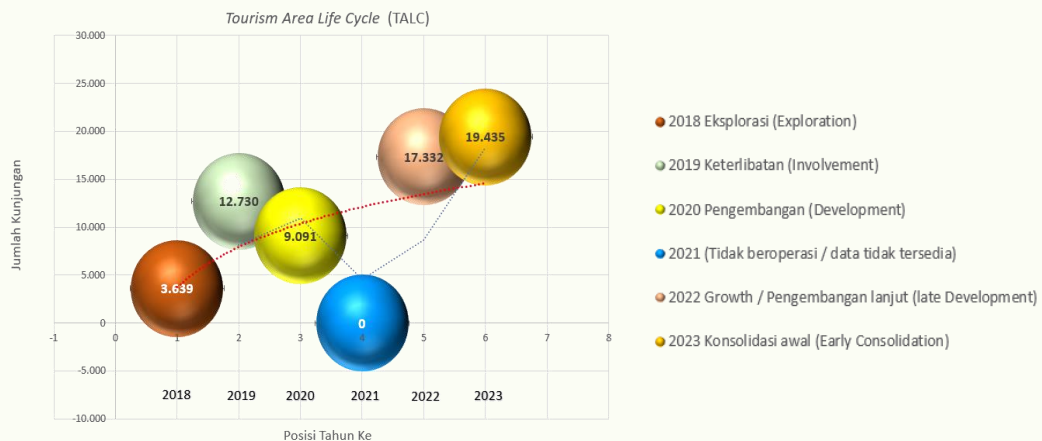
No.	Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
1	Alat snorkeling	Rp50.000/set	Per set
2	Perahu	Rp30.000	Sekali putaran
3	Gazebo	Rp30.000	Per bangunan
4	Kemping/Menginap	Rp35.000	Per hari
5	Tiket masuk	Rp5.000	Per orang
6	Parkir mobil	Rp10.000	Per kendaraan
7	Parkir motor	Rp3.000	Per kendaraan

Sumber: *Gorontalo Post*. 2023 [33]; diolah.

Dalam perspektif CBT, peningkatan PAD memberi ruang bagi investasi ulang pada infrastruktur dasar, penguatan organisasi, dan pengembangan produk wisata berbasis komunitas [19], Namun, Bete et al. (2024) [23] mencatat bahwa kapasitas kelembagaan BUMDes masih perlu diperkuat karena pembagian tugas belum konsisten dan proses musyawarah memerlukan waktu panjang. Situasi ini menegaskan pentingnya tata kelola yang adaptif agar manfaat ekonomi dapat tersebar lebih merata [6].

Keberhasilan CBT [5] sangat ditentukan kepemimpinan lokal, ketangguhan organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang responsif. Kondisi ini relevan bagi Desa Luk Panenteng, yang saat ini telah memperoleh keuntungan ekonomi besar tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan agar manfaatnya lebih inklusif.

Keikutsertaan Desa Luk Panenteng dalam jaringan desa wisata dan program ADWI memberikan peluang pendampingan kapasitas yang selaras dengan prinsip CBT [7], [8]. Dengan pengelolaan yang tepat, pertumbuhan kunjungan dan PAD sebagaimana ditunjukkan Tabel 2 dan Tabel 3 berpotensi menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih merata.

**Gambar 8.** Fase TALC Danau Paisu Pok Tahun 2018–2023

Sumber: *Hasil Analisis (2025)*, diolah dari Bete dkk. (2024) [19].

Dalam kerangka TALC, tidak adanya data pada 2021 mencerminkan dampak pembatasan pandemi. Pemulihan kuat pada 2022 dan pertumbuhan moderat pada 2023–2024 menunjukkan perpindahan dari fase pertumbuhan menuju konsolidasi. Tanpa pengaturan kapasitas, destinasi berisiko memasuki stagnasi [25], karena itu strategi pengelolaan yang dianjurkan meliputi:

- penetapan kuota kunjungan harian untuk menjaga daya dukung ekologis.
- zonasi konservasi dan area aktivitas wisata agar arus pengunjung terkontrol.
- integrasi manajemen arus wisata antara danau paisu pok dan pantai poganda.

Rekomendasi Praktis:

- Penguatan kelembagaan bumdes melalui penyusunan SOP pengelolaan, pelatihan manajemen, dan transparansi pengambilan keputusan.

- b) Penetapan kapasitas kunjungan harian untuk menjaga daya dukung ekologis.
- c) Digitalisasi promosi dan sistem reservasi untuk mengatur arus kunjungan.
- d) Pendampingan desa wisata melalui jejaring nasional yaitu Jadesta dan ADWI untuk memperkuat pilar CBT dan kapasitas komunitas.

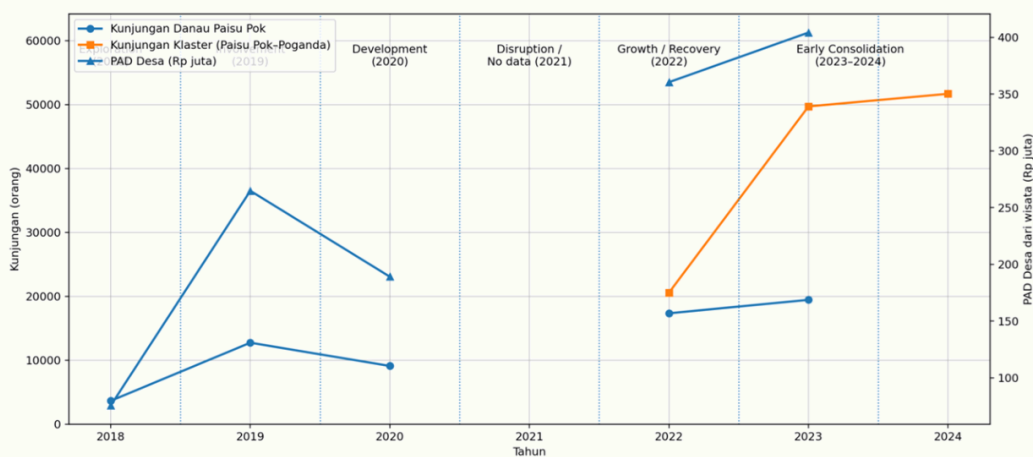
Sintesis Temuan: Destinasi Berkembang menuju Klaster Maju

Kecenderungan pertumbuhan kunjungan klaster dan pola jangka panjang Danau Paisu Pok sebagai unit tersendiri memperlihatkan konsistensi arah pergerakan destinasi yang sebelumnya telah diuraikan. Integrasi temuan dari dinamika kunjungan, PAD Desa, dan status kebijakan menegaskan bahwa Danau Paisu Pok–Pantai Poganda tidak lagi berfungsi hanya sebagai destinasi berkembang, tetapi mulai mengambil peran sebagai klaster maju dalam struktur destinasi Kabupaten Banggai Kepulauan. Kerangka TALC digunakan untuk membaca fase perkembangan ini agar keterkaitan antara pola kunjungan, pengelolaan, dan kebijakan lebih terjelaskan.

Landasan pertama terkait dinamika permintaan yang terlihat pada pertumbuhan kunjungan klaster yang melampaui 140% pada periode 2022–2024 (lihat Tabel 1)[20] selaras dengan kenaikan moderat pada 2024 dan kontribusi sekitar 47,39% dari total kunjungan kabupaten (104.837 kunjungan) [25]. Peta pertumbuhan Danau Paisu Pok sebagai unit tunggal dengan lonjakan 249,82% pada 2019, kontraksi –28,59% pada 2020, hingga pemulihan kuat 90,65% pada 2022 (lihat Tabel 2) mendukung temuan bahwa destinasi memasuki *fase growth* menuju *consolidation*. Konsistensi pemulihan ini memperkuat posisi klaster sebagai pusat pertumbuhan baru pada wilayah pesisir utara Pulau Peleng.

Landasan kedua bersumber dari kebijakan dan promosi yang saling menguatkan. Kesesuaian antara status kebijakan dan intensitas promosi resmi menjadikan klaster sebagai unsur utama narasi pariwisata daerah, sekaligus memastikan kontinuitas visibilitas destinasi [7]–[18].

Landasan ketiga berkaitan dengan dinamika desa wisata dan pengelolaan berbasis komunitas yang terpantau melalui tren PAD Desa. Pertumbuhan PAD Desa yang identik dengan pertumbuhan kunjungan 249,82% pada 2019, –28,59% pada 2020, 90,65% pada 2022, dan 12,13% pada 2023, menunjukkan bahwa struktur pendapatan berbasis tiket membuat fluktuasi PAD bergerak proporsional terhadap jumlah wisatawan [19]. Pola ini menegaskan posisi masyarakat sebagai aktor sentral, sekaligus menandai perlunya penguatan kelembagaan BUMDes agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya besar, tetapi juga terkelola secara berkelanjutan, karena itu, diperlukan SOP (*standar operasional prosedur*) pengelolaan yang lebih profesional untuk menjaga konsistensi layanan dan memperkuat status klaster maju.



Catatan: (1) Data kunjungan klaster tersedia untuk periode 2022–2024; khusus tahun 2024 hanya mencakup Januari–September. (2) Data kunjungan dan PAD Danau Paisu Pok tersedia untuk periode 2018–2023; tidak terdapat pencatatan pada tahun 2021. (3) Data tahun 2018 (Danau) hanya merekam periode Agustus–Desember.

Gambar 9. Grafik Sintesis Integratif Kunjungan, PAD Desa, dan Fase TALC: Klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda, 2018–2024

Sumber: Hasil Analisis (2025).

Keterbatasan data destinasi pembandingan membuat pembacaan “klaster maju” bersifat relatif, namun hubungan antara pertumbuhan kunjungan, arah kebijakan, fase TALC, dan kontribusi PAD sudah cukup untuk memposisikan klaster ini sebagai simpul strategis dalam sistem destinasi kabupaten. Transformasi peran tersebut membuka peluang penataan manajemen kunjungan, penguatan CBT, dan penyusunan sistem data yang lebih solid agar peningkatan fungsi klaster tetap selaras dengan kapasitas ekologi dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Data kunjungan klaster Danau Paisu Pok–Pantai Poganda meningkat pesat sepanjang 2022–2024, dari 20.555 wisatawan pada 2022 menjadi 49.696 pada 2023, dan 51.669 hingga September 2024, menempatkan klaster pada *fase growth* menurut TALC. Pertumbuhan ini mengindikasikan pergeseran fungsi dari destinasi berkembang menuju klaster maju, ditandai pangsa kunjungan wisatawan sangat signifikan atau melampaui 140% , status kebijakan, konsistensi promosi resmi, serta kontribusi sekitar 47,39% dari total kunjungan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024. Penguatan kelembagaan menjadikan Desa Luk Panenteng Destinasi Pariwisata (berkembang) dan memberdayakan masyarakat melalui CBT menjadi “klaster maju”.

Kenaikan kunjungan menuntut pengaturan daya dukung yang lebih disiplin, mengingat sensitivitas ekologis dan keterbatasan infrastruktur klaster. Kedekatan spasial Danau Paisu Pok–Pantai Poganda ($\pm 9,2$ km) memungkinkan paket kunjungan terpadu untuk memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan belanja wisatawan, sementara TALC dan CBT menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi, dan tata kelola lokal. Implikasi pengelolaan menuntut penyusunan SOP operasional, sistem reservasi digital, dan pengaturan arus pengunjung antara danau dan pantai.

Keterbatasan penelitian meliputi deret data pendek, sifat data agregat, dan ketergantungan pada sumber sekunder. Meskipun posisi klaster sebagai maju bersifat relatif, konsistensi pertumbuhan, peningkatan PAD Desa, fase TALC, dan prinsip CBT menunjukkan peran klaster telah melampaui destinasi berkembang. Penguatan CBT penting untuk menjaga keseimbangan manfaat ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan ketahanan tata kelola, sementara TALC membantu mengantisipasi risiko perlambatan.

Langkah operasional, direkomendasikan penerapan sistem reservasi/tiketing digital terintegrasi danau–pantai (kuota harian, slot waktu, dan verifikasi QR) serta manajemen arus pengunjung melalui penjadwalan rute kunjungan, penetapan titik naik-turun/transit, dan pembatasan kapasitas pada jam puncak untuk mencegah kepadatan di titik rentan. Temuan ini membuka peluang penelitian lanjutan terkait pengelolaan destinasi alam kepulauan secara adaptif melalui penguatan komunitas, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sistem data pariwisata yang lebih andal.

PENGAKUAN

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan artikel ini. Ungkapan terima kasih ini ditujukan atas dukungan yang berkesinambungan, masukan dan diskusi yang konstruktif, serta kesediaan membantu selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini

DEKLARASI PENULIS

- Kontribusi Penulis** : Para penulis berperan secara signifikan dalam perumusan dan perancangan penelitian, serta bertanggung jawab atas proses analisis data, penafsiran, dan pembahasan hasil penelitian. Seluruh penulis telah menelaah dan menyetujui naskah akhir.
- Pernyataan Penulis** : Penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan maupun hibah dari lembaga atau badan pendanaan apa pun.
- Konflik Kepentingan** : Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Informasi Tambahan : Tidak ada informasi tambahan yang disertakan dalam artikek ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, Statistik Wisatawan Nusantara 2023, vol. 6. 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/23/9bbe16f7f850126353cea5d2/statistik-wisatawan-nusantara-2023.html>
- [2] A. Yunani et al., “Systematic literature review on tourism village in Indonesia,” WSEAS Trans. Syst., vol. 23, pp. 60–65, 2024, doi: 10.37394/23202.2024.23.6.
- [3] S. Arintoko, A. Ahmad, A. A. Gunawan, and Supadi, “Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia,” Geoj. Tour. Geosites, vol. 29, no. 2, 2020, doi: 10.30892/gtg.29202-477.
- [4] A. Giampiccoli and M. Saayman, “Community-based tourism, responsible tourism, and infrastructure development and poverty,” Afr. J. Hosp. Tour. Leis., vol. 6, no. 2, pp. 1–28, 2017.
- [5] S. Priatmoko, M. Kabil, Y. Purwoko, and L. D. Dávid, “Rethinking sustainable community-based tourism: A villager’s point of view and case study in Pampang Village, Indonesia,” Sustainability, vol. 13, no. 6, pp. 1–15, 2021, doi: 10.3390/su13063245.
- [6] A. Puri, S. Suheri, and Z. Rahman, “Pariwisata berbasis komunitas: Kajian literatur sistematis berdasarkan jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus (2018–2023),” J. Manag. Public Policy, vol. 1, no. 1, 2025, doi: 10.14710/jppmr.v1i1.48799.
- [7] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa wisata Luk Panenteng, Kabupaten Banggai Kepulauan,” Jejaring Desa Wisata (JADESTA). [Online]. Available: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/luk_panenteng_2.
- [8] Kemenparekraf/Baparekraf RI, “Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024,” Kemenparekraf/Baparekraf RI. [Online]. Available: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/luk_panenteng_2.
- [9] Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Penetapan Desa Wisata Kabupaten Banggai Kepulauan 2024 (SK No. 268 Tahun 2024). 2024. [Online]. Available: https://jdih.banggaikep.go.id/peraturan/file/SK_NOMOR_268_TAHUN_2024.PDF.
- [10] A. Wirdayanti and V. Ariani, Pedoman Desa Wisata (Tourism Village Guidelines). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/getdata/file/Buku-Membangun-Desa.pdf>.
- [11] I. Djadda, “Danau Paisu Pok dan Pantai Poganda, wisata Banggai Kepulauan yang kian viral,” Banggai Raya. [Online]. Available: <https://banggairaya.id/danau-paisu-pok-dan-pantai-poganda-wisata-banggai-kepulauan-yang-kian-viral/>
- [12] Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 165 Tahun 2019 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 2019.
- [13] Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan. 2024.

- [14] K. Lynch, *The Image of the City*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1960. [Online]. Available: https://www.cooldavis.org/wp-content/uploads/2022/03/THE_IMAGE_OF_THE_CITY_Kevin_Lynch.pdf.
- [15] P. Beritelli, S. Reinhold, and C. Laesser, "Visitor flows, trajectories and corridors: Planning and designing places from the traveler's point of view," *Ann. Tour. Res.*, vol. 82, Art. no. 102936, 2020, doi: 10.1016/j.annals.2020.102936.
- [16] Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, "Wisata Banggai Kepulauan Explore Banggai Kepulauan," *JDIH Banggai Kepulauan*. [Online]. Available: https://jdih.banggaikep.go.id/Peraturan/searching/?id_peraturan_cat=84&nomor=165&tahun=2019&tentang_katalog=&peraturan_status=#.
- [17] Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, "Desa Wisata Luk Panenteng," *Pariwisata Sulawesi Tengah*. [Online]. Available: <https://pariwisata.sultengprov.go.id/data-pariwisata/desa-wisata/desa-banggai-kepulauan/44-desa-wisata-luk-panenteng.html>.
- [18] Trip.com, "Atraksi wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan (2025)," *Trip.com*. [Online]. Available: <https://id.trip.com/travel-guide/attraction/banggai-islands-regency-1478664/tourist-attractions/type-museums-70-53>.
- [19] S. F. Bete and S. Alhadar, "Pengelolaan objek wisata Danau Paisupok dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD-Des) di Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan," *Inovatif: J. Penelit. Ilmu Sos.*, vol. 4, no. 5, 2024, doi: 10.31004/inovatif.v4i5.15366.
- [20] Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, "Kunjungan Wisatawan 2024," *Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan*. [Online]. Available: <https://pariwisata.banggaikep.go.id/kunjungan-wisatawan/>.
- [21] Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, "Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan," *PPID Kemendagri*. [Online]. Available: <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/MmSWNLu4snBD2QdByS6OMPjd3uRuLB18YpRNbNbv.pdf>.
- [22] I. Ristiyani and Y. Hermawan, "Pengembangan wisata selam di Banggai Kepulauan," *J. Pariwisata Indonesia.*, vol. 19, no. 2, pp. 24–34, 2023, doi: 10.53691/jpi.v19i2.397.
- [23] A. Giampiccoli and M. Saayman, "Community-based tourism development model and community participation," *Afr. J. Hosp. Tour. Leis.*, vol. 7, no. 4, pp. 1–127, 2018.
- [24] Y. A. Singgalen and H. Prasadja, *Pariwisata Berbasis Komunitas*. Bandung, Indonesia: Widina Media Utama, 2025.
- [25] R. W. Butler, "The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources," *Can. Geogr.*, pp. 5–12, 1980, doi: 10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x.
- [26] B. S. R. A. Nugroho, "Penataan kawasan wisata Danau Paisupok, Luk Panenteng, Bulagi Utara, Banggai Kepulauan dengan konsep integrated ecotourism," *Universitas Gadjah Mada*, 2019. [Online]. Available: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/177631>.
- [27] S. S. H. A. Kusworo, "Penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan," *Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada*. [Online]. Available: <https://puspar.ugm.ac.id/2020/03/19/penyusunan-rencana-induk-pembangunan-pariwisata-kabupaten-banggai-kepulauan/>.
- [28] E. Baltranaitė, M. Inácio, and L. Valença Pinto, "Tourism impacts on marine and coastal ecosystem services: A systematic review," *Geogr. Sustain.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, 2025, doi: 10.1016/j.geosus.2025.100277.

-
- [29] C. A. Sucahyo, Supriyadi, and R. L. Wicaksono, "Analysis of suitability and carrying capacity for ecotourism purposes in the Sepanjang Beach tourism area," *Int. J. Mar. Eng. Innov. Res.*, vol. 10, no. 1, pp. 406–415, 2025. [Online]. Available: <https://iptek.its.ac.id/index.php/ijmeir/article/view/22732/9229>.
- [30] A. T. Yulius et al., *Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*. Bogor, Indonesia: IPB Press, 2018. [Online]. Available: https://poltekkpkarawang.ac.id/slims/?p=show_detail&id=275.
- [31] Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, "DTW Kabupaten Banggai Kepulauan: Paisu Pok," *Pariwisata Sulawesi Tengah*. [Online]. Available: <https://pariwisata.sultengprov.go.id/data-pariwisata/daya-tarik-wisata/dtw-kabupaten-banggai-kepulauan/104-paisu-pok.html>.
- [32] I. S. Basri, R. Arifin, M. Ilham, S. Sarifuddin, and N. A. Djafar, "Evaluasi dan Penguatan Amenitas–Homestay Berbasis CHSE, GSTC, dan SUPW: Studi Kasus Destinasi Wisata Danau Paisu Pok," *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 9, no. 2, pp. 2116–2231, Feb. 2026, doi: 10.56338/jks.v9i2.10376.
- [33] Asian, "Danau Paisu Pok, surga tersembunyi di sudut Bangkep," *Gorontalo Post*. [Online]. Available: <https://gorontalopost.co.id/2023/02/22/danau-paisu-pok-surga-tersembunyi-di-sudut-bangkep/>.